



.....
MENYAMA BRAYA: REFLEKSI MULTIKULTURALISME MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL

Oleh
Ida Bagus Brata
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: ibbrata@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengkaji konsep Bali Bersaudara: Refleksi Multikulturalisme Memperkuat Identitas Nasional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah induktif kualitatif dengan pendekatan eksploratif dalam latar yang alamiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bali tidak dapat distereotipkan dengan agama atau kelompok tertentu yang damai, namun telah berubah penuh dinamika sejalan dengan pluralitas masyarakat Bali. Memahami fenomena multikulturalisme pada masyarakat Bali, tumbuh semangat multikulturalisme oleh orang Bali dan sebaliknya aktualisasi semangat multikulturalisme dari kelompok pendatang, dengan didasari etika “*vasudaiva Kuthumbhakam*”, bahwa kita “*menyama*” (bersaudara), semua manusia adalah satu keluarga. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka tergantung kepada sesamanya, sehingga mereka selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Semua agama mengajarkan umatnya agar menjunjung tinggi kasih sayang, toleransi, dan kedamaian sehingga secara tekstual konflik dapat dihindarkan. Apabila kearifan ini dirawat bersama, maka ciri masyarakat Indonesia yang ramah tamah dan cinta damai akan tetap menjadi identitas nasional.

Kata Kunci : menyama, multikulturalisme, identitas nasional

PENDAHUALUAN

Sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, 17-8-1945, para pendiri bangsa (*founding fathers*) sangat menyadari akan sifat pluralistik masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Namun dalam perjalanan sejarahnya sejak kemerdekaan diikrarkan, euporia kemerdekaan sangat kental mewarnai kehidupan pemerintahan dari masa ke masa dan sifat asli bangsa Indonesia yang pada jaman dahulu kala sulit bersatu karena terdiri dari kerajaan-kerajaan muncul kembali dalam bentuk fanatisme sempit suku, agama, dan kedaerahan dalam bentuk konflik vertikal maupun horizontal (Pastika,2003).

NKRI yang pluralistik seakan-akan sedang hanyut dalam fakta dan citra buram terkait dengan berbagai konflik yang terjadi di beberapa daerah. Cita-cita mewujudkan budaya harmoni, rujukan Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan sepertinya tengah mengalami distorsi cukup serius. Keberanian moral untuk jujur,

saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman sepertinya begitu sulit diwujudkan.

Peringatan akan adanya tantangan dan ancaman terhadap stabilitas dan keutuhan berbangsa dan bernegara sesungguhnya telah diperingatkan oleh beberapa tokoh di negeri ini. Misalnya antropolog Koentjaraningrat awal dekade 1990-an mengingatkan bahwa bubarnya Uni Soviet, konflik etnik di negara Yugoslavia akan membawa imbas besar terhadap negara-negara yang multi etnik, seperti Indonesia. Peringatan senada juga telah disampaikan oleh budayawan Nurcholis Madjid, seperti berikut.

“.....akhir-akhir ini kita menyaksikan dengan perasaan mencekam suasana hubungan antarumat beragama di tanah air mulai terusik, bahkan telah pula menelan banyak korban jiwa, kehormatan dan harta benda. Padahal, bangsa Indonesia sering membanggakan atau dibanggakan sebagai bangsa yang memiliki tingkat toleransi dan kerukunan beragama yang sangat tinggi. Namun intensitas konflik di masyarakat



kita akhir-akhir ini yang diduga telah melibatkan penganut agama-agama dengan tingkat kekejaman yang sulit diterima akal sehat....”(Madjid,2001:2).

LANDASAN TEORI

Mengutip pendapatnya Durkheim, Dawam Rahardjo (1999) menyatakan bahwa agama secara historis memiliki citra integratif dari sumber konflik. Bahwa dalam sejarah Indonesia, perbedaan suku dan agama intra dan antar agama tidak pernah menjadi asal usul terjadinya konflik nasional. Setiap tahun bangsa Indonesia selalu memperingati Sumpah Pemuda (28 Oktober), dengan mengucapkan trilogi kebangsaan: “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”. Perbedaan daerah, suku, dan bahasa lokal telah ditemukan sintesanya dalam ideologi *Bhinneka Tunggal Ika* yang lahir dalam suatu proses yang berlangsung secara dan dalam kesadaran otonomi, tanpa ada unsur paksaan eksternal, sebab ketika sumpah itu diucapkan NKRI belum lahir.

Nottingham (1985) menyebutkan agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Senada dengan apa yang diungkapkan Beuken dan Kuschel (Pujasastawa, 2017) mengatakan bahwa meskipun tidak semua tindakan kekerasan di dunia ini berbasis pada agama, namun dalam kenyataannya banyak sekali kekerasan yang terjadi atas nama agama. Atas dasar itu, maka Huntington (2002) secara tegas menekankan agama sebagai roh peradaban dan memprediksikan masa depan politik dunia diwarnai oleh benturan antarperadaban yang tidak lepas dari simbol-simbol agama. Menurutnya agamalah yang akan banyak berperan dalam konflik antarperadaban masa depan.

Pada kenyataannya memang tidak membutuhkan waktu lama, realitas dunia masa kini sesungguhnya telah menunjukkan dunia ini telah dipenuhi berbagai konflik kekerasan bernuansa SARA. Pecahnya Unisoviet, Yugoslavia, konflik Israel dan Palestina yang tidak berkesudahan, pergolakan di Sinjiang Cina,

persoalan tanah Khasmir antara Pakistan dan India, pemberontakan bernuansa agama di beberapa negara Afrika, tragedi *World Trade Centre*, tragedi bom Bali, tragedi rohingya di Myanmar, sampai pemberontakan ISIS di Timur Tengah dan Filipina selatan tidak terlepas dengan sentimen agama.

Pada hakikatnya semua agama memiliki misi yang sama yaitu menyerukan semua manusia harus berbuat baik. Sistem keyakinan yang lazim disebut agama seharusnya dipahami secara totalitas dan teratur yang diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau semua agama menjalankan misi ini, tidak akan ada masalah dan tidak akan terjadi konflik antar agama. Namun agama yang semestinya memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan telah digunakan sebagai alat legitimasi untuk mengembangkan faham radikal melalui aksi teror dan aksi kekerasan lainnya. Berkembangnya faham radikal dengan mengusung doktrin agama dikhawatirkan dapat menyuburkan sifat intoleransi antar komunitas keagamaan. Semangat saling menghrgaai perbedaan menjadi terancam, sementara indahnya perbedaan dalam keberagaman tidak mustahil akan menjadi musibah. Berkenaan dengan hal inilah dalam tulisan ini akan dikaji konsep Bali bersaudara: refleksi multikulturalisme memperkuat identitas nasional.

II. Multikulturalisme

Dalam dimensi teoretik, multikulturalisme merupakan varian dari teori perbedaan yang diilhami gagasan posmodernisme yang menyatakan bahwa perbedaan manusia secara analitis lebih penting daripada kesamaan mereka. Paradigma multikulturalisme merayakan perbedaan sebagai suatu kerangka kerja yang ada di dalamnya untuk menghargai aneka kelompok dan narasi khas mereka masing-masing. Multikulturalisme posmodern menentang kemungkinan menyatunya kelompok-kelompok yang berbeda ke dalam satu alasan bersama yang dapat mengubah struktur sosial secara totalitas (Agger,2003:140).

Menurut Tilaar (2004:83) multikulturalisme memiliki dua ciri utama, yaitu



(a) kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*); dan (b) legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Sementara Parekh seperti yang dikutip Azyumardi Azra (2003:41) menyebutkan multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijaksanaan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “*politics of recognition*”.

Lawrence Blum (2001:16) mengartikan multikulturalisme sebagai sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Dalam kaitan ini mencakup sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Multikulturalisme pada hakikatnya merupakan gerakan memperjuangkan kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghargai dalam satu tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam konteks multikulturalisme, Brian Fay (1998:7) menekankan ada tiga syarat multikulturalisme yaitu adanya interaksi (*interaction*) antar kelompok, keterbukaan (*openness*), dan pembelajaran (*learning*). Sementara itu Budianta (2003) mengisyaratkan pentingnya empati, solidaritas, dan keadilan sosial untuk mewujudkan masyarakat multikultural dalam arti bahwa baik kaum mayoritas maupun yang minoritas dituntut harus bersifat terbuka, menghormati satu sama lain, dan mau belajar dari kelompok lain.

Kenyataan masyarakat Indonesia yang multikultural sesungguhnya telah dijadikan acuan oleh para pendiri bangsa dalam mendesain bangsa Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun secara retrospektif, sentralistik

kekuasaan, politik monokulturalisme yang dilaksanakan oleh pemerintah prareformasi atas nama stabilitas untuk *developmentalism* telah menghancurkan kearifan lokal yang ada di masyarakat, misalnya tradisi *pela gandong* di Ambon, *Republik Nagari* di Sumatera Barat dan lain-lainnya. Padahal kearifan lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang lainnya.

III. Identitas

Barker (2005:14) menyatakan identitas merupakan konstruksi dirkursif, produk wacana-wacana atau cara-cara tertentu dalam berbicara (*regulated ways of speaking*) tentang dunia. Sebagai konstruksi diskursif karena melalui pertuturan dan pertulisan-lah seseorang atau sekelompok orang dapat dikenal dan memperkenalkan jati dirinya. Jati diri seorang guru, pedagang, dokter atau pejabat dapat disimak dan dipahami lewat bahasanya, lewat tuturan dan tulisannya dan terbentuk dari representasi-representasi terutama bahasa.

Menurut Maunati (2004:23) berkaitan dengan persoalan identitas ada beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan, misalnya penanda-penanda identitas budaya bisa berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada setiap agama, bahasa, dan adat pada budaya yang bersangkutan. Dalam kaitan ini lebih lanjut dijelaskan bahwa tumpang tindih dapat terjadi di antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Misalnya, di daerah yang abu-abu dimana penanda-penanda identitas saling bertumpang tindih, eksistensi perbedaan budaya menjadi sebuah persoalan. Oleh karena itu identitas sebenarnya adalah sebuah konstruksi, identitas budaya dapat dengan sengaja dibentuk atau dibangun.

Dalam perspektif historis, persoalan agama, etnisitas, dan identitas merupakan isu sensitif yang dapat dimanipulasi untuk memicu reaksi-reaksi emosional dan apabila hal ini tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat fatal. Persoalan identitas akan muncul ke permukaan apabila dirasakan adanya ancaman terhadap eksistensinya. Persoalan



identitas dapat memicu persoalan etnisitas dalam kerangka konsep multikulturalisme.

Terbentuknya identitas budaya sangat tergantung pada proses-proses tertentu dengan pengalaman-pengalaman sejarah yang berbeda. Mengutip pendapatnya Picard, Vickers (1997:148) menyebutkan bahwa memahami identitas orang Bali perlu penelusuran kembali sejarah konstruksinya, begitu pula untuk memahami identitas bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara.

Setiap bangsa dan negara mempunyai identitas nasionalnya, setiap bangsa dan negara memiliki pemerintahan, wilayah teritori, dan memiliki masyarakat. Setiap negara bangsa, masyarakat, memiliki kebudayaan baik tradisional maupun modern. Daeng (2000) mengatakan budaya membela negara merupakan identitas baru, yaitu identitas nasional negara dan bangsa. Atas dasar itu maka identitas nasional merupakan suatu kompleksitas yang terdiri dari sejumlah ciri yang mewujudkan suatu koherensi dalam suatu talatitas. Talatitas atau nation mampu memperlihatkan satu kesatuan daya dan ciri-ciri khas sehingga dapat dibedakan dari nation lainnya.

Mudji Sutrisno (2006) memandang negara bangsa, nasionalisme, dan identitas nasional bukan fenomena alam tetapi sebagai hasil pembentukan sejarah budaya yang bersifat kontigen. Bangsa-bangsa bukanlah hanya proses pembentukan praktis, namun merupakan sistem reputasi budaya yang melahirkan identitas nasional. Identitas nasional itu diproduksi secara terus-menerus melalui tindakan diskursif. Sama seperti yang diungkapkan Barker (2005) bahwa identitas nasional merupakan suatu bentuk imajinatif dengan simbol dan wacana negara bangsa, dan bangsa bukanlah sekedar formasi politik, namun juga sistem representasi kultural tempat identitas nasional terus menerus direproduksi sebagai tindakan diskursif.

Anderson (1999:21) yang memaknai bangsa hanyalah sebuah komunitas imajiner (*imagined communities*). Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak dapat kenal dengan

sebagian besar anggota lain, namun dalam pikiran setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Akan tetapi, toh di setiap benak orang yang menjadi warga bangsa itu hidup sebuah bayangan kebersamaan mereka. Artinya suatu bangsa itu ada tatkala sejumlah orang dalam suatu masyarakat menganggap diri mereka membentuk sebuah nation, atau berperilaku seolah-olah mereka telah membentuk sebuah bangsa. Sebab identitas nasional adalah konstruksi yang pada hakikatnya dirajut melalui simbol dan ritual yang berkaitan dengan kategori wilayah dan administrasi (Barker,2005).

IV. *Menyama Braya*: Refleksi Multikulturalisme Memperkuat Identitas Nasional

Konflik dan integrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural tidak mungkin dihindari. Namun integrasi yang berkedamaian merupakan cita-cita bagi seluruh umat manusia, baik dilihat dari teks agama maupun kebudayaan sebagai tatanan kenyataan ideasional. Tetapi pada kenyataannya konflik dalam skala kecil sampai besar dan rumit kerap muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Masyarakat Bali yang terkenal sangat menjunjung tinggi asas keharmonisan atau equilibrium baik sosial maupun ekologis seperti tercermin dalam filosofi *Tri Hitakarana* yang mereka miliki, tidak luput dari permasalahan konflik. Konflik yang terjadi bisa konflik antar kelompok di dalam satu desa *pakraman* atau antar desa *pakraman* satu dengan desa *pakraman* yang lainnya. Pada batas-batas tertentu, konflik terasa diperlukan untuk pengembangan wawasan, inovasi, dan pengembangan sistem serta mencari kebenaran yang asasi. Namun berbagai bentuk Konflik kekerasan yang destruktif dan dehumanisasi harus dicegah, dikelola atau ditransformasi (Geriya,2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif historis, sejak awal masyarakat Bali telah menunjukkan pluralitas dalam identitas *Bali Mula/Bali Age* (Bali Asli) dan *wong Majapahit* (Bali Majapahit). Kenyataan ini dimulai sekitar 1350 M, ketika Sri Kresna



Kepakisan dari Kediri (Jawa Timur) memegang kuasa Majapahit atas Bali, mengukuhkan sebuah identitas sosial baru *wong Majapahit* yang membedakan dengan identitas penduduk lokal Bali yang disebut orang *Bali Mula/Bali Age*.

Masyarakat Bali sudah mengalami kontak dengan etnik dan budaya lain sejak awal masehi, misalnya dengan kebudayaan India melalui kegiatan perdagangan (Ardika,2003). Kontak dengan budaya luar berlanjut terus dengan migrasi dan perdagangan regional, kolonial dan selanjutnya sampai Bali bersentuhan dengan industri pariwisata. Penduduk dominan pulau Bali adalah etnis Bali beragama Hindu, namun sudah menjadi fakta sosial kultural bahwa sejak lama di daerah ini terdapat berbagai etnik lain seperti: Cina, Arab, India, Jawa, Bugis dan lainnya dengan latar belakang sosial budaya dan agama yang berbeda.

Adalah hal yang lazim orang Islam, Kristen, Katolik, Budha bahkan toris di pulau Bali disebut dengan istilah “*nyama*”, bukan dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai saudara. Kehadiran mereka di pulau Bali sangat memperkaya dinamika pluralitas masyarakat Bali dan memiliki peranan penting bagi pembangunan Bali secara keseluruhan, yang mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik.

Tersebar kampung-kampung Islam di Bali di tengah-tengah orang Bali yang beragama Hindu. Terdapat juga banyak kampung-kampung Kristen di Bali di tengah-tengah orang Bali yang beragama Hindu. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang Budha di tengah-tengah orang Bali yang beragama Hindu. Mereka dapat hidup rukun dan damai, bahkan mereka mempunyai pertalian darah karena ikatan pernikahan/perkawinan.

Dalam perspektif kajian ilmu sosial modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik, melainkan lebih kepada integrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Durkheim (Nottingham,1985) bahwa hakikat agama pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk “solidaritas”. Agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat

individu menjadi satu kesatuan melalui pembentukan sistem kepercayaan dan ritus. Lewat simbol-simbol yang sifatnya suci, agama mengikat orang-orang ke dalam berbagai kelompok masyarakat.

Sejujurnya, bila dicermati secara saksama bahwa pada setiap ajaran keagamaan sesungguhnya terimplikasi di dalamnya prinsip-prinsip solidaritas untuk mewujudkan kedamaian. Semangat kedamaian dalam agama Hindhu dikenal kata *santhi*, dalam agama Budha ada istilah *shadu*, dalam agama Kristen dikenal istilah *shlama*, dan dalam agama Islam dikenal kata *salam*. Atas dasar itulah semua agama mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung kasih sayang, harmonisasi, toleransi, persaudaraan dan kesederajatan antar sesamanya.

Pemahaman tentang keragaman budaya dalam berbagai wujud perlu terus-menerus dilakukan dan ditingkatkan. Kearifan-kearifan budaya ini dikembangkan untuk memperkuat kesadaran budaya bangsa dalam upaya membangun ke-Indonesiaan. Pemahaman tentang identitas nasional menjadi begitu penting dilakukan untuk menyatukan masyarakat Indonesia pada sekitar pemahaman diri, memberi fokus serta kekuatan pada rasa memiliki bersama, membentuk citra diri kolektif, mengolah kebaikan-kebaikan yang relevan, memfasilitasi produksi diri komunitas dan kesinambungan antargenerasi, memertahankan kesetiaan umum, memperkuat kohesi sosial, serta menata kehidupan moral dan politik (Parekh, 2008:306).

Penegasan identitas nasional dalam upaya memperkokoh jati diri bangsa terutama diarahkan untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai budaya lokal yang dapat mengayomi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kekayaan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah, merupakan aset sosial budaya yang sangat tinggi nilainya, serta perlu secara terus digali, dimaknai, dan digunakan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bali merupakan ekologi pulau kecil, terbatas dalam sumber daya alam, namun pulau ini memiliki sumber daya sosial dan kemanusiaan yang besar. Modal sosial dan modal budaya



sepanjang sejarah perjalanan kebudayaan Bali merupakan unsur penting dalam membangun peradaban yang kaya nilai-nilai solidaritas, kesetaraan, dan persaudaraan. Beberapa konsep kunci yang dipegang teguh orang Bali sebagai pedoman di dalam hubungan dengan manusia lain, seperti:

1. *Tri Hita Karana*; merupakan filosofi hidup sebagai landasan budaya Bali, bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan tercapai bila manusia itu memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan ciptaan yang lain.
2. *Tri Kaya Parisuda*, sebagai wujud keseimbangan dalam membangun karakter dan jati diri insani, dengan menyatukan unsur pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tertanamnya nilai-nilai seperti ini melahirkan insan yang berkarakter, memiliki konsistensi, dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajiban sosialnya di masyarakat.
3. *Tatwam Asi*, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Apabila kita menyayangi diri sendiri, mengasihi diri sendiri, begitulah seharusnya kita berpikir, berkata, dan berbuat kepada orang lain.
4. *Menyama (vasudaiva kuthumbhakam)* mengandung makna persamaan, persaudaraan, dan pengakuan sosial bahwa kita adalah bersaudara. Sebagai satu kesatuan sosial persaudaraan maka sikap dan perilaku dalam memandang orang lain sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka dan duka.

Dalam etika Hindu disebutkan “*vasudaiva kuthumbhakam*”, semua makhluk adalah satu keluarga (Putra,2010). Sesungguhnya makna yang terkandung dalam “*vasudaiva kuthumbhakam*” adalah Bali bersaudara sama artinya dengan *menyama*, merupakan sebuah kesadaran bahwa manusia itu tidak hidup sendiri di muka bumi ini. Mereka dilingkupi oleh komunitasnya, masyarakatnya, alam semesta sekitarnya. Pada hakikatnya manusia selalu

tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya. Karena itulah manusia selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa, di samping sikap pengakuan akan kesederajatan dan toleransi antar sesama.

Mereka mengenal istilah *menyama/bersaudara* dalam harmoni dengan sesamanya. Konteks dari *menyama* adalah dalam hubungan atau relasi sosial budaya sehari-hari antar masyarakatnya. Relasi seperti ini mereka wujudkan dalam bentuk saling menolong, memberi kepada saudaranya dalam suka maupun duka, misalnya pada hari-hari besar keagamaan, membangun rumah, kematian atau aktivitas yang lain.

Dalam banyak hal cara hidup *menyama/bersaudara* dengan mudah ditemukan pada masyarakat Bali. Mereka mengenal tradisi *megibung*, yaitu makan bersama dalam satu wadah. *Megibung* penuh dengan nilai-nilai kebersamaan, dalam *megibung* semua merasa sebagai satu keluarga, tidak ada yang merasa rendah dan tidak ada yang merasa lebih tinggi (sederajat). Misalnya memberikan nuansa Bali dalam merayakan Idul Fitri, Natalan sehingga dikenal istilah *penyajaaan*, *penampahan*, *manis*, dan *pahing* Idul Fitri atau Natal yang memiliki makna budaya tidak jauh berbeda dengan pemahaman masyarakat Bali Hindu.

Ngejot, sebuah tradisi saling mengirimkan makanan antar umat. Tradisi *ngejot* biasanya dilakukan beberapa hari menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran dan Mauludan, Natalan, Imlek, Galungan dan Kuningan. Makna *ngejot* tidak jauh berbeda dengan *megibung*, yakni mempererat tali persaudaraan dan kekerabatan antar umat.

Nama-nama warga setempat juga menggunakan nama Bali di depan nama muslimnya, seperti Wayan Lukmanul, Komang Toyib, Ketut Syukur Yahya. Mereka juga menggunakan nama-nama Bali setelah nama baptisnya, seperti Salestinus Wayan Ginantra, Yustinus Nyoman Sugiapranata dll. Mereka



mengklaim sebagai orang Bali, Cuma keyakinannya berbeda.

Repleksi multikulturalisme selanjutnya dapat dilihat pada “*Puja Mandala*”, yaitu tempat pemujaan (pda satu areal) yang dibangun tahun 1994 di Desa Bualu Kuta Selatan Badung Bali. Pada *Puja Mandala* ini dibangun berbagai tempat suci dari berbagai agama yang diakui di Indonesia, seperti Masjid Ibnu Batutah, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Pura Jagatnatha, Gereja Protestan Jemaat Bukit Doa, dan Vihara Budha Guna. Momen seperti jumatatan di Masjid, Misa dan Natal di Gereja, Waisak di Vihara, odalan di Pura menunjukkan semakin kuatnya solidaritas dan persaudaraan antar umat beragama.

Berbagai bentuk akulturasi dapat terjadi karena ada nilai antar agama yang dapat diterapkan tanpa harus saling meniadakan, sepanjang tidak menyentuh nilai keyakinan. Karena kesadaran inilah, pluralitas dan integrasi di Bali dipertahankan bahkan diperkaya. Apabila hal ini dapat dipertahankan tidak mustahil dijadikan tonggak membangun kemesraan dan tali persaudaraan antar umat beragama di Bali bahkan di nusantara sebagai ciri identitas nasional.

Kehidupan yang saling menghormati satu dengan yang lain menjadikan kenyamanan hidup di Bali. Masyarakat yang berbeda agama saling menyapa dan memberi salam. Bali kokoh dengan pluralitasnya. Semua orang merasa memiliki Bali. Perasaan memiliki seperti ini menyebabkan Bali tidak hanya menjadi tanggungjawab orang Bali Hindu, namun menjadi tanggungjawab setiap komponen masyarakat Bali dalam merawat keberagaman dengan didasari kesetaraan, keharmonisan, dan persaudaraan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berkaitan dengan uraian di atas beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Konflik merupakan bagian integral dari sistem sosial, termasuk pada masyarakat Bali sebagai bagian pluralitas masyarakat Indonesia. Namun harus disadari tidak ada

satu bangsa pun membiarkan dirinya terlibat dalam konflik, sebab konflik dapat mengganggu keamanan.

2. Sebagai proses sosial, sumber konflik harus dikenali secara baik dan mereka yang berkonflik harus mau bekerja sama, memberi berbagai kemudahan, dan saling kontrol, agar jangan terjerumus ke arah yang satu mendominasi yang lain. Semua harus berjalan beriringan, saling menghargai dalam kesetaraan.
3. Semuanya itu dapat diwujudkan apabila ada komitmen memperkuat kebudayaan warga negaranya, baik yang bersumber pada kebudayaan nasional, agama, dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat, seperti kearifan yang tercermin dalam etika Hindu “*Vasudaiva Kutumbhakam*”, artinya menyama, bahwa kita adalah bersaudara, yang dikuatkan oleh konsep *Tat Wam Asi*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. (Nurhadi, penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- [2] Anderson, Benedict. 1999. *Komunitas-Komunitas Terbayang Renungan tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Alih Bahasa Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Atmadja, Nengah Bawa. 2010. *Ajag Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKis.
- [4] Azyumardi Azra. 2003. “*Identitas dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia*”. Dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya Fakultas Sastra Universitas Udayana* No.6 Tahun XIV-Agustus.
- [5] Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- [6] Blum, Lawrence A. 2001. “*Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*”. Dalam Larry May, Shari Collins-Chobanian, dan Kai Wong (ed): *Etika Terapan I Sebuah*



- pendekatan Multikultural. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- [7] Brata, Ida Bagus. 2017. *Menyama Braya: Representasi Kesadaran Kolektif Lokal Memperkuat Identitas Nasional*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional & Kongres Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah, Universitas Negeri Medan, 13 – 15 Juli 2017.
- [8] Fay, B. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: Multicultural Approach*. Oxford Blackwell.
- [9] Geriya, I Wayan. Potensi dan Solusi Konflik dari Perspektif Sosial Budaya (Menanti Keadilan dan character Building Manusia Indonesia). Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Solusi Konflik dari Sudut Pandang Budaya dan Hukum, Forum Perguruan Tinggi Sebeli, 6 Juni 2003.
- [10] Huntington, Samuel P. 2002. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (M. Sadar Ismail, Penerjemah). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- [11] Madjid, Nurcholis. 2001. "Etika Beragama dari Perbedaan Menuju Persamaan". Dalam: *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*. Editor: Nur Achmad. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [12] Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS
- [13] Nottingham, Elizabeth K. 1985. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: CV. Rajawali.
- [14] Oommen, T.K. 2009. *Kewarganegaraan, kebangsaan & Etnisitas Mendamaikan Persaingan Identitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.
- [15] Parekh, Bhiku. 2007. *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- [16] Pastika, Made Mangku. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Upaya Menegakkan Supremasi Hukum. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Solusi Konflik dari Sudut Pandang Budaya dan Hukum, Forum Perguruan Tinggi Sebeli, 6 Juni 2003.
- [17] Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Forum Jakarta-Paris ECOLE Francaise d'Exstreme-Orient.
- [18] Pujaastawa, Ida Bagus Gde. 2017. *Menyimak Wacana Ajeg Bali dari Perspektif Multikulturalisme*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Memaknai Kebhinekaan dan Merajut Persaudaraan Memperkokoh Jati Diri Bangsa. Denpasar, 28 Agustus 2017.
- [19] Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- [20] Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.